

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Mely G. Tan dalam Silalahi (2012:28-29) menjelaskan penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hal ini mungkin sudah ada hipotesis-hipotesis, mungkin belum, tergantung dari sedikit-banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Menurut Pasolong (2012:165), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan pengukuran atau numerik terhadap masalah yang hendak diteliti dan juga pada pengumpulan data dan analisis data. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sugiyono (2013:8) yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan melihat pengertian penelitian kuantitatif diatas maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat statistik deskriptif dan tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan yaitu untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

## **B. Populasi dan Lokasi Penelitian**

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang berarti bukan hanya orang, akan tetapi juga meliputi obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi tersebut tidak hanya sekedar jumlah yang terdapat pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu (Sugiyono, 2013:80).

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah populasi 505 kabupaten/kota. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Indonesia, berdasarkan lokasi inilah peneliti nantinya memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut *total sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 124) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 505 kabupaten/kota.

### C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2013:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sehingga, ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki proporsi yang lebih kecil, dan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rumusan rasio kemandirian daerah (Halim, 2002) yaitu :

$$RK = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan: RK = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

PAD merupakan total penjumlahan dari komponen-komponen. Diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas

kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (Permendagri No.13 tahun 2006).

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan kemandirian keuangan daerah adalah:

1. Membuat tabel perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2002 hingga 2014,
2. Mengidentifikasi pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah untuk masing-masing tahun,
3. Membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan (sesuai formulasi rasio kemandirian),
4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut dengan berpatokan pada:
  - a) Apabila tingkat kemandirian  $<10,00\%$ , berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sangat kurang.
  - b) Apabila tingkat kemandirian  $10,01-20,00\%$ , berarti kemampuan keuangan daerah tersebut kurang.
  - c) Apabila tingkat kemandirian  $20,01-30,00\%$ , berarti kemampuan keuangan daerah tersebut cukup.
  - d) Apabila tingkat kemandirian  $30,01-40,00\%$  berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang.
  - e) Apabila tingkat kemandirian  $40,01-50,00\%$  berarti kemampuan keuangan daerah tersebut baik.

- f) Apabila tingkat kemandirian >50,01% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sangat baik (Halim, 2002).

Berikut akan dijelaskan mengenai variabel dan definisi operasional sebagaimana tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Variabel dan Definisi Operasional**

No	Variabel	Indikator	Referensi	Konsep Variabel	Formula	Skala Pengukuran
1	Kemandirian Keuangan	Rasio Kemandirian	Halim (2002)	Kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintah	$\frac{PAD}{TPD}$	Skala Rasio

*Sumber: Halim (2002)*

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Arikunto (2002:107) menjelaskan sumber data dalam penelitian adalah “subjek dari mana saja data dapat diperoleh”. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber data yang memiliki hubungan dengan penelitian, yaitu dokumen Laporan

Realisasi APBD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tahun anggaran 2002-2014. Data yang digunakan dalam penelitian juga merupakan data sekunder yang berasal dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Pasolong (2012:130), pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Menurutnya, permasalahan penelitian tidak akan bisa terpecahkan jika teknik pengumpulan data yang digunakan kurang sesuai, dan menghasilkan data yang tidak dibutuhkan. Sugiyono (2013:137) juga menjelaskan, pengumpulan data berhubungan dengan cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi.

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Soehartono (2008:70), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Biasanya berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun dokumen yang diteliti adalah laporan realisasi APBD seluruh kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2002 hingga 2014.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data sebagaimana dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

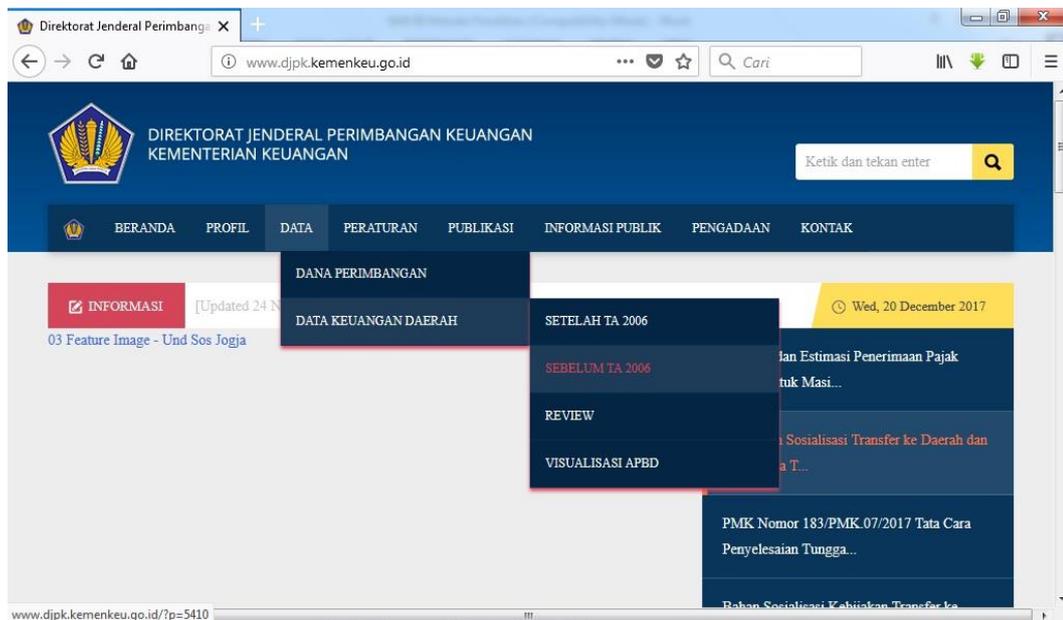
1. Membuka website direktorat jendral perimbangan keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) sebagaimana gambar 2 berikut:



Gambar 2. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

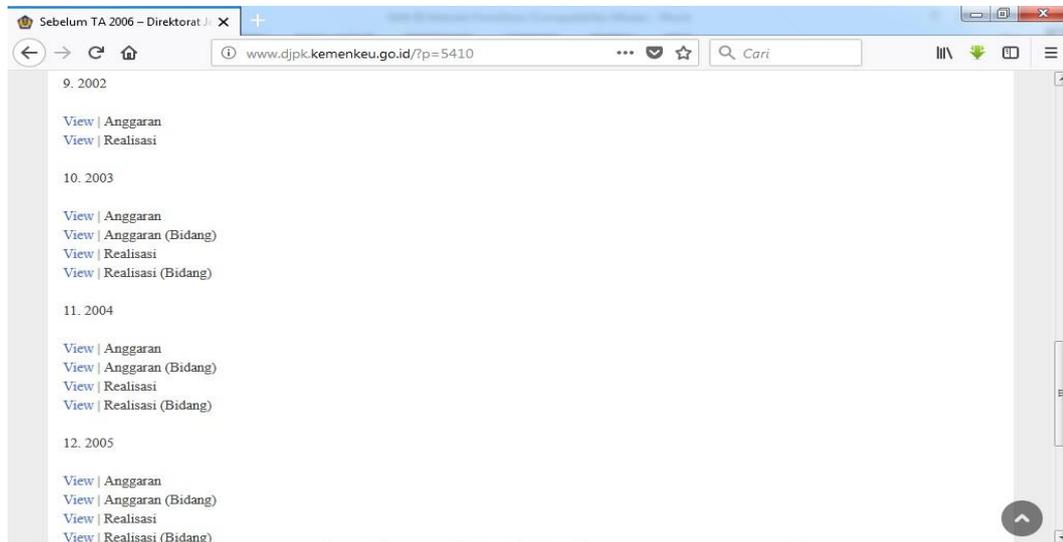
2. Memilih menu Data – Data keuangan daerah – Sebelum TA 2006  
sebagaimana gambar 3 berikut:



Gambar 3. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

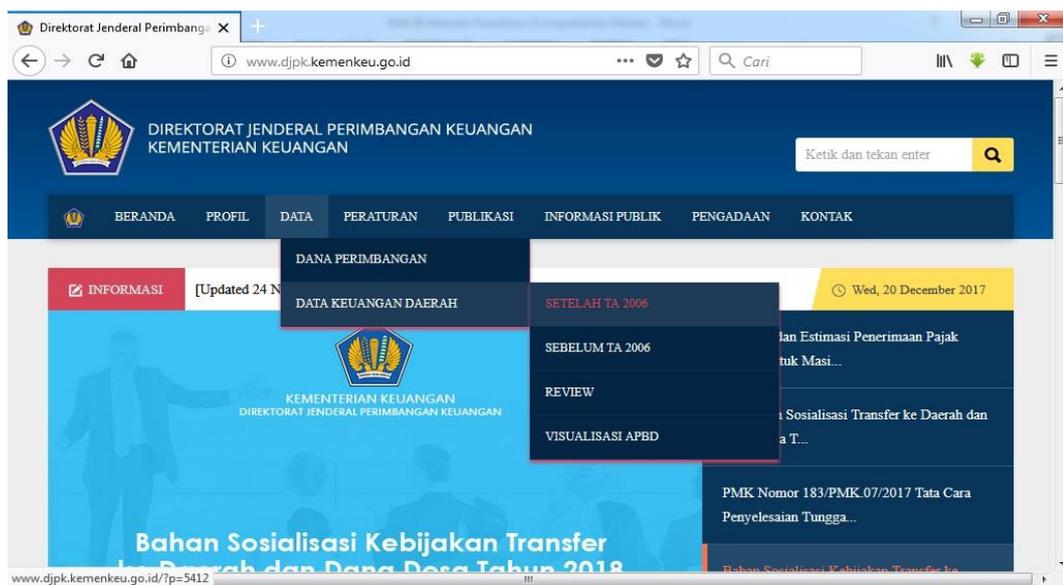
3. Membuka data realisasi disetiap tahun anggaran sebagaimana gambar 4 berikut:



Gambar 4. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

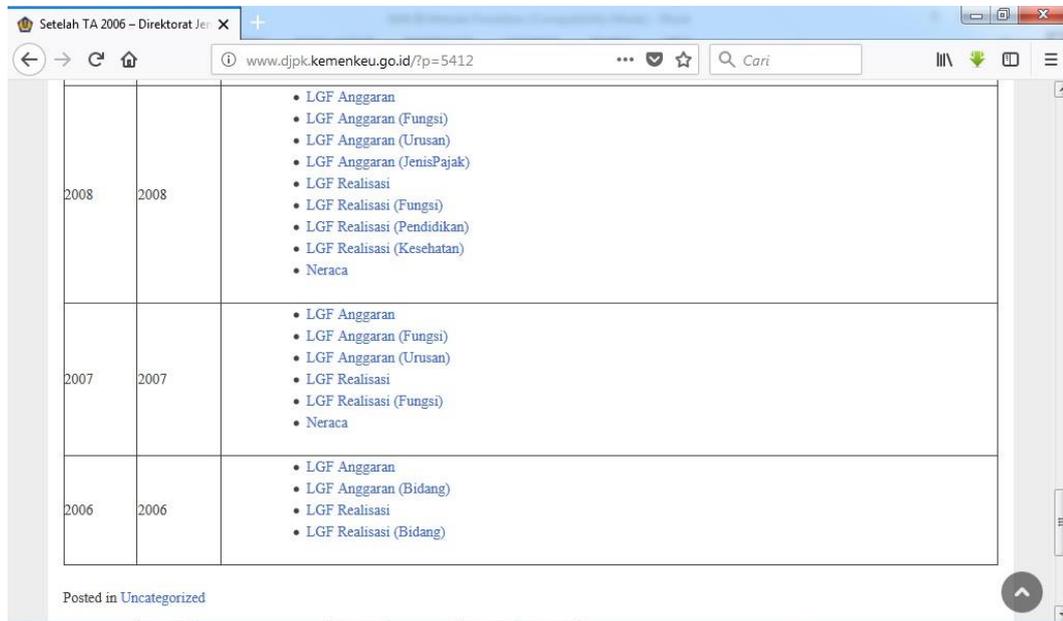
4. Memilih menu Data – Data keuangan daerah – Setelah TA 2006 sebagaimana gambar 5 berikut:



Gambar 5. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

5. Membuka data realisasi disetiap tahun anggaran sebagaimana gambar berikut:

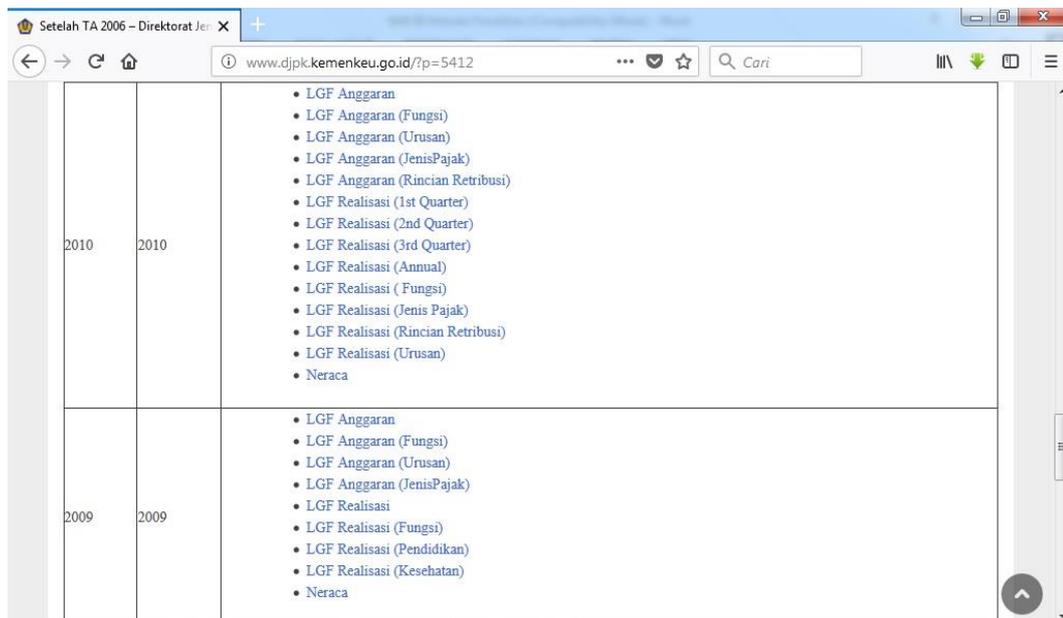


2008	2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan)</li> <li>• LGF Anggaran (JenisPajak)</li> <li>• LGF Realisasi</li> <li>• LGF Realisasi (Fungsi)</li> <li>• LGF Realisasi (Pendidikan)</li> <li>• LGF Realisasi (Kesehatan)</li> <li>• Neraca</li> </ul>
2007	2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan)</li> <li>• LGF Realisasi</li> <li>• LGF Realisasi (Fungsi)</li> <li>• Neraca</li> </ul>
2006	2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Bidang)</li> <li>• LGF Realisasi</li> <li>• LGF Realisasi (Bidang)</li> </ul>

Posted in Uncategorized

Gambar 6. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)



2010	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan)</li> <li>• LGF Anggaran (JenisPajak)</li> <li>• LGF Anggaran (Rincian Retribusi)</li> <li>• LGF Realisasi (1st Quarter)</li> <li>• LGF Realisasi (2nd Quarter)</li> <li>• LGF Realisasi (3rd Quarter)</li> <li>• LGF Realisasi (Annual)</li> <li>• LGF Realisasi ( Fungsi)</li> <li>• LGF Realisasi (Jenis Pajak)</li> <li>• LGF Realisasi (Rincian Retribusi)</li> <li>• LGF Realisasi (Urusan)</li> <li>• Neraca</li> </ul>
2009	2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan)</li> <li>• LGF Anggaran (JenisPajak)</li> <li>• LGF Realisasi</li> <li>• LGF Realisasi (Fungsi)</li> <li>• LGF Realisasi (Pendidikan)</li> <li>• LGF Realisasi (Kesehatan)</li> <li>• Neraca</li> </ul>

Gambar 7. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

2012	2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Realisasi (Jenis Pajak Daerah)</li> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan)</li> <li>• LGF Anggaran (Jenis Pajak)</li> <li>• LGF Anggaran (Rincian Retribusi)</li> <li>• LGF Realisasi (1st Quarter) update per 12 Desember 2012</li> <li>• LGF Realisasi (2nd Quarter) update per 12 Desember 2012</li> <li>• LGF Realisasi (3rd Quarter) update per 12 Desember 2012</li> <li>• LGF Realisasi (Annual) update per 21 November 2014</li> <li>• LGF Realisasi (Fungsi)</li> <li>• LGF Realisasi (Urusan)</li> <li>• LGF Neraca</li> </ul>
2011	2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Realisasi (Jenis Pajak Daerah)</li> <li>• LGF Realisasi (Jenis Retribusi Daerah)</li> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan) per Des 2014</li> <li>• LGF Anggaran (JenisPajak)</li> <li>• LGF Anggaran (Rincian Retribusi)</li> <li>• LGF Realisasi (1st Quarter)</li> <li>• LGF Realisasi (2nd Quarter)</li> <li>• LGF Realisasi (3rd Quarter)</li> <li>• LGF Realisasi (Annual) per 21 November 2014</li> </ul>

Gambar 8. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

2014	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Neraca</li> <li>• LGF Anggaran (Ringkas) per Okt 2014</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi) per Des 2014</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan) per Des 2014</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi) per Des 2015</li> <li>• LGF Realisasi (Triwulan I) per Okt 2014</li> <li>• LGF Realisasi Semester I</li> <li>• LGF Realisasi (Triwulan III) per Nov 2014</li> <li>• LGF Realisasi APBD Tahun 2014</li> <li>• LGF Anggaran (Jenis Pajak)</li> <li>• LGF Neraca</li> </ul>
2013	2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Anggaran</li> <li>• LGF Anggaran (Fungsi)</li> <li>• LGF Anggaran (Urusan)</li> <li>• LGF Anggaran (Jenis Pajak)</li> <li>• LGF Anggaran (Rincian Retribusi)</li> <li>• LGF Realisasi (Triwulan I) update per Okt 2014</li> <li>• LGF Realisasi Semester I</li> <li>• LGF Realisasi (Triwulan III)</li> <li>• LGF Realisasi (Annual) update per 21 Nov 2014</li> <li>• LGF Neraca</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGF Realisasi (Jenis Retribusi Daerah)</li> </ul>

Gambar 9. Website dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

6. Mengelompokkan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah disetiap tahun anggaran sebagaimana gambar berikut:

Uraian	Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Utara	Kota Lhokseumawe	Kab. Nagan Raya	Kab. Nias	Kota Binjai
<b>Realisasi APBD TA 2014 Format Permendagri</b>								
<b>Pendapatan</b>	973,175	634,636	1,275,985	1,755,876	768,270	889,970	515,836	804,091
<b>PAD</b>	112,034	31,030	86,545	178,551	48,730	65,178	65,082	71,967
Pajak daerah	11,548	3,779	7,130	17,957	20,547	11,012	3,962	28,683
Retribusi daerah	67,004	12,862	21,146	120,225	12,618	10,948	13,341	33,757
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,688	1,798	1,654	15,572	2,682	1,803	6,097	1,868
Lain-lain PAD yang sah	29,794	12,591	56,615	24,797	12,884	41,415	41,683	7,659
<b>Daper</b>	646,403	457,273	865,767	1,282,847	565,797	604,834	431,070	585,699
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25,293	24,772	70,182	457,535	62,087	29,333	11,279	28,095
Dana Alokasi Umum	549,687	380,852	703,898	755,061	469,957	500,941	347,699	526,070
Dana Alokasi Khusus	71,422	51,649	91,686	70,251	33,753	74,559	72,092	31,534
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	214,738	146,334	323,673	294,479	153,743	219,958	19,684	146,425
Hibah	900	146	-	1,992	-	-	-	-
Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lain	13,152	9,360	19,647	21,875	11,742	10,914	8,964	26,732
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	74,294	22,516	73,766	133,474	68,149	52,911	9,971	104,612
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lain	126,393	114,077	230,261	137,139	73,853	156,134	750	15,081
Lain-lain	-	234	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja</b>	906,668	603,377	1,258,956	1,704,732	727,481	898,786	512,571	804,308

Gambar 10. Data realisasi APBD TA 2014

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

No.	Nama Daerah	Pendapatan Asli Daerah												
		PAD-02	PAD-03	PAD-04	PAD-05	PAD-06	PAD-07	PAD-08	PAD-09	PAD-10	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PAD-14
1	Kab. Aceh Tengah	4,193	4,941	4,767	8,303	15,871	16,520	21,970	18,535	20,781	55,832	76,870	132,068	
2	Kab. Aceh Tenggara	3,428	5,016	4,366	2,401	8,618	6,855	6,235	8,020	11,910	25,324	25,621	56,044	
3	Kab. Aceh Utara	21,821	37,775	38,029	55,368	103,120	119,858	79,721	79,925	31,191	42,269	61,833	99,870	
4	Kab. Pidie	3,998	5,587	6,310	13,397	12,462	15,924	15,817	22,950	45,272	76,879	166,599		
5	Kota Banda Aceh	6,666	6,352	9,457	5,687	21,110	30,859	43,098	49,483	61,794	85,560	129,122	171,777	
6	Kota Langsa	1,400	2,062	2,396	6,074	9,814	10,887	17,135	12,843	14,314	21,612	16,667	57,265	
7	Kab. Aceh Barat	6,888	5,522	14,847	18,115	28,280	18,944	24,267	21,043	24,727	46,928	112,034		
8	Kab. Aceh Selatan	2,759	3,680	3,820	6,665	11,679	14,504	16,265	17,586	17,161	33,021	36,181	78,487	
9	Kab. Aceh Timur	6,234	7,157	7,152	14,411	8,766	8,543	13,668	18,283	42,805	86,545			
10	Kab. Bireuen	3,098	4,226	14,195	12,752	49,926	41,038	10,547	16,817	22,942	93,893	172,302		
11	Kota Sabang	9,823	8,418	10,418	18,036	15,143	17,145	22,387	24,927	27,377	42,723			
12	Kota Lhokseumawe	12,318	9,414	12,656	19,012	25,347	20,605	21,581	19,415	28,690	28,231	36,214	48,730	
13	Kab. Gayo Lues	831	1,777	4,204	4,726	6,430	7,896	11,174	14,218	20,214	28,906			

Gambar 11. Tabel pendapatan asli daerah tahun 2002-2014

Sumber: Penulis, diolah dari data realisasi APBD, Departemen Keuangan

Tabel Total Pendapatan Daerah Tahun 2002-2014														
No.	Nama Daerah	Total Pendapatan Daerah												
		TPD-02	TPD-03	TPD-04	TPD-05	TPD-06	TPD-07	TPD-08	TPD-09	TPD-10	TPD-11	TPD-12	TPD-13	TPD-14
1	Kab. Aceh Tengah	242,879	268,656		221,046	354,340	399,549	442,089	432,350	470,553	612,297	675,023	791,919	1,041,693
2	Kab. Aceh Tenggara	207,309	179,372	189,642	243,686		361,207	384,276	387,249	477,208	563,011	553,710	637,645	861,079
3	Kab. Aceh Utara	880,516	919,486	754,052	1,215,368	1,143,674	1,092,472	980,701	733,891	904,916	1,115,418	1,260,246	1,493,208	1,755,876
4	Kab. Pidie	344,246	370,086		375,150		594,942	492,341	545,563	613,366	733,893	837,368	1,015,669	1,305,974
5	Kota Banda Aceh	226,115	235,567	227,425	263,577	412,718	466,404	470,178	500,500	586,845	719,614	787,575	928,241	1,134,104
6	Kota Langsa	101,008	119,010	150,022	182,169	283,604	292,542	322,850	343,766	352,364	439,400	466,012	560,020	756,493
7	Kab. Aceh Barat		162,111	196,939		348,669	383,677	448,376	430,912	485,996	516,631	588,982	720,458	973,175
8	Kab. Aceh Selatan		203,995	209,638	243,558	355,653	399,687	434,640	437,113	475,505	546,447	642,699	749,089	1,006,144
9	Kab. Aceh Timur		344,306			436,496	452,895	518,564	616,273	594,091	725,153	797,125	955,562	1,275,985
10	Kab. Bireuen		254,732	262,890		455,386	507,163	596,867	548,666	618,002	706,003	839,044	1,028,722	1,321,492
11	Kota Sabang		142,866		159,394	229,692	266,842	278,249	279,729	313,058	391,221	405,018	427,090	525,215
12	Kota Lhokseumawe		177,317	187,182	213,325	305,364	368,105	387,364	386,174	411,681	520,817	582,616	643,373	768,270
13	Kab. Gayo Lues		121,484			269,145	283,094	333,602	352,864	388,937	481,060	453,625	521,669	734,208

Gambar 12. Tabel total pendapatan daerah tahun 2002-2014

Sumber: Penulis, diolah dari data realisasi APBD, Departemen Keuangan

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah semua sumber data lain terkumpul. Setelah data terkumpul, aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data dalam penelitian ini adalah program program *Microsoft excel 2013*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik deskriptif dengan menggunakan analisis Univariat.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul apa adanya dan tidak untuk menarik kesimpulan secara umum. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif

karena penelitian ini dilakukan pada populasi tanpa menggunakan sampel. Statistik deskriptif adalah penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik, diagram lingkaran, pictogram, modus, median, mean, perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan persentase (Sugiyono, 2013:147). Sedangkan analisis data Univariat adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan satu variabel tunggal (Silalahi, 2012:349).

Pemilihan analisis data univariat dilakukan oleh peneliti karena dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal yaitu kemandirian keuangan daerah. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah Rasio Kemandirian. Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Adapun formula Rasio Kemandirian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2008:232) adalah sebagai berikut:

$$RK = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan: RK = Rasio Kemandirian

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Dengan melihat rasio kemandirian sebagaimana hasil dari perhitungan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah diatas, maka dapat

dihasilkan rasio kemandirian berdasarkan prosentase tingkat kemandirian yang dimiliki suatu daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5. Rasio Kemandirian**

<b>PAD/TPD (%)</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>
<10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

*Sumber: Departemen Dalam Negeri*

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di suatu daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.